

**Gerakan Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat
Terhadap Penolakan Revisi Undang - Undang Nomor 30
Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik Pada Fakultas Ilmu Sosial
Dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

Oleh:

**ARIQ FADEL HERMAN
BP 1610832002**



**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

Dengan ini menyatakan bahwa,

Nama : Ariq Fadel Herman
Nomor Buku Pokok : 1610832002
Jurusan : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Gerakan Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat
Terhadap Penolakan Revisi Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi

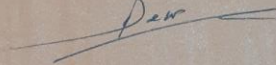
Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing dan disahkan oleh Ketua
Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas.

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Indah Adi Putri, M.IP
NIP.198112072006042004



Dewi Anggraini, SIP. M.Si
NIP. 198110282010122004

Mengetahui

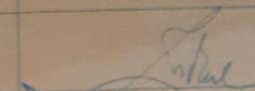

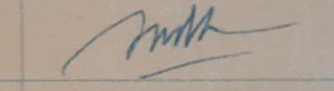
Ketua Jurusan Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas



Dr. Indah Adi Putri, M.IP
NIP. 198112072006042004

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini dengan judul "Gerakan Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat Terhadap Penolakan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" telah diuji pada Sidang Ujian Skripsi Jurusan Ilmu Politik Pada Tanggal 13 Januari 2021, bertempat di Ruang Sidang Jurusan Ilmu Politik/ Ujian On Line, dengan tim penguji :

Tim Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dr. Aidinil Zetra, MA	Ketua	
Drs. Tamrin, M.Si	Sekretaris	
Dr. Asrinaldi, M.Si	Anggota	
Dr. Tengku Rika Valentina, SIP. MA	Anggota	
Dr. Indah Adi Putri, MIP	Anggota	
Dewi Anggraini, SIP.M.Si	Anggota	

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas



Dr. Azwar, M.Si

NIP. 196712261993031001

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya, skripsi dengan judul **Gerakan Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat Terhadap Penolakan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/ Doktor), baik di Universitas Andalas maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ilmiah ini murni gagasan, penilaian dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali bantuan dan arahan dari tim pembimbing.
3. Karya tulis ilmiah ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat tertulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padang, 8 Januari 2021
Yang membuat pernyataan

Ario Fadel Herman
No BP.1610832002

ABSTRAK

Ariq Fadel Herman, 1610832002, Skripsi Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Judul : Gerakan Penolakan Masyarakat Sipil Sumatera Barat Terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembimbing : (1) Dr. Indah Adi Putri.,M.IP (2) Dewi Anggraini S.IP.,M.Si

Penelitian ini berawal dari respon penolakan masyarakat terkait adanya revisi atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR RI tahun 2019. Gerakan penolakan juga terjadi di Sumatera Barat yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, aktivis LSM dan unsur masyarakat sipil lainnya. Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat (KMSS) merupakan sekumpulan organisasi masyarakat sipil yang juga ikut serta melakukan penolakan terhadap revisi Undang-Undang tersebut. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat memperjuangkan penolakan terhadap Revisi UU KPK. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat dalam melakukan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sedangkan untuk menentukan informan penelitian menggunakan *purposif sampling*. Untuk membantu menjelaskan fenomena peneliti menggunakan teori komprehensif gerakan sosial yang merupakan perpaduan dari tiga teori dominan dalam melihat gerakan sosial baru oleh Doug McAdam, John D. McCarthy, dan Mayer N Zald ditambah konsep masyarakat sipil dari AS Hikam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh KMSS berawal dari melakukan konsolidasi gerakan dan berlanjut dengan cara-cara kampanye media sosial, penyebaran pamflet, aksi-aksi kreatif, petisi dan demonstrasi.

Kata Kunci : Gerakan Sosial, Revisi UU KPK, Anti Korupsi, Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat.



ABSTRACT

Ariq Fadel Herman, 1610832002, Diploma Thesis, Department of Political Science, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Title: West Sumatra Civil Society Rejection Movement Against the Revision of Law Number 30 Year 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. Advisors: (1) Dr. Indah Adi Putri., M.IP (2) Dewi Anggraini S.IP., M.Si

This research begins with the response of the community's refusal regarding the revision of Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission committed by the Government and DPR RI in 2019. A resistance movement also occurred in West Sumatra, which was driven by students, lecturers, NGO activists and other elements of civil society. The West Sumatra Civil Society Coalition (KMSS) is a group of civil society organizations that also participated in rejecting the revision of the Law. The question in this research is how the West Sumatra Civil Society Coalition to fight for rejection of the KPK Law Revision. The purpose of this research is to explain the efforts made by the West Sumatra Civil Society Coalition in rejecting the revision of Law Number 30 Year 2002. The research method used is qualitative with a case study approach. Meanwhile, to determine the research informants using purposive sampling. To help explain the phenomenon, researchers use a comprehensive theory of social movements which is a combination of three dominant theories in looking at new social movements by Doug McAdam, John D. McCarthy, and Mayer N Zald plus the concept of civil society from AS Hikam. The results of this study indicate that there are efforts made by KMSS starting from consolidating the movement and continuing with social media campaigns, distributing pamphlets, creative actions, petitions and demonstrations.

Keywords: Social Movement, KPK Law Revision, Anti-Corruption, West Sumatra Civil Society Coalition.

